©2026, by author(s)
Vol.10, No. 2, pp. 264-288.
DOI: 10.32788/ijir.v10i1.897

IMPLEMENTASI TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM KONSERVASI ORANGUTAN DI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING

The Implementation of Collaborative Governance in Orangutan Conservation at Tanjung Puting National Park

Jihan Nisrina Salwa
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia
jihan.nisrina.isip23@mail.umy.ac.id

Arie Kusuma Paksi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Bantul, Indonesia
ariekusumapaksi@umy.ac.id

INFO ARTIKEL
Article History

Received
17 April 2026

Revised
16 August 2026

Accepted
17 August 2026

Kata kunci:
collaborative governance; environmental governance; orangutan conservation; Orangutan Foundation International; Tanjung Puting National Park

Keywords:
collaborative governance; konservasi orangutan; *Orangutan Foundation International*; Taman Nasional Tanjung Puting; tata kelola lingkungan

Abstract
This study aims to analyze how the interactions and role division among the government, non-governmental organization (OFI), and local communities form collaborative governance in orangutan conservation at Tanjung Puting National Park (TNTP). Utilizing the collaborative governance framework of Ansell and Gash (2008) enriched by the joint capacity concept of Emerson et al. (2012), this qualitative study employs a case study approach based on secondary data. The findings indicate an integration of joint capacity, where TNTP Authority provides legal legitimacy and zoning management, OFI contributes funding, rehabilitation, and technical expertise, and local communities participate in field monitoring and fire prevention. This study concludes that collaboration effectiveness is driven by resource interdependence among actors, although its sustainability faces challenges regarding capacity asymmetry, high reliance on external funding, and ecological vulnerability.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi dan pembagian peran antara pemerintah, organisasi non-pemerintah (OFI), dan masyarakat lokal membentuk tata kelola kolaboratif dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Menggunakan kerangka kerja *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008) yang diperkaya dengan konsep *joint capacity* Emerson et al. (2012), penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini berbasis data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan adanya integrasi kapasitas bersama: Balai TNTP menyediakan legitimasi hukum dan pengaturan zonasi kawasan, OFI berkontribusi pada pendanaan, rehabilitasi, dan kepakaran teknis, sementara masyarakat lokal berperan dalam pengawasan kawasan dan pencegahan kebakaran hutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas kolaborasi ditopang oleh ketergantungan sumber daya antar-aktor, meskipun keberlanjutannya masih dihadapkan pada tantangan berupa asimetri kapasitas, ketergantungan tinggi pada pendanaan eksternal, dan kerentanan ekologis kawasan.

ISSN: 2548-4109 electronic
ISSN: 2657-165X printed

PENDAHULUAN

Perubahan lingkungan global dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati tidak lagi dapat dipahami semata sebagai isu domestik suatu negara, melainkan sebagai bagian dari tata kelola lingkungan yang melibatkan berbagai aktor lintas global. Deforestasi, degradasi habitat, serta perubahan iklim telah memberikan tekanan yang signifikan terhadap eksosistem hutan tropis di berbagai wilayah dunia, termasuk di Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem hutan tropis yang menjadi habitat bagi berbagai spesies endemik (Gunawan et al. 2022). Namun, dalam beberapa dekade terakhir tekanan terhadap ekosistem hutan terus meningkat akibat ekspansi lahan, kebakaran hutan, serta perubahan penggunaan lahan yang mempercepat degradasi habitat alami. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius bagi upaya konservasi keanekaragaman hayati, khususnya bagi spesies yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap keberadaan hutan tropis.

Salah satu spesies yang paling terdampak oleh perubahan lingkungan tersebut adalah Orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*). Spesies ini telah dikategorikan sebagai sangat terancam punah atau terancam kritis (*Critically Endangered*) oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN Red List of Threatened Species, 2024), yang menandakan bahwa populasi orangutan berada pada tingkat ancaman kepunahan yang sangat tinggi dan memerlukan upaya perlindungan sistematis yang berkelanjutan. Selain memiliki nilai konservasi yang tinggi, orangutan juga memainkan peran ekologis penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan tropis. Melalui aktivitas makan dan pergerakannya di kanopi hutan, orangutan berkontribusi dalam proses penyebaran biji berbagai jenis pohon yang mendukung regenerasi vegetasi hutan. Oleh karena itu, keberadaan orangutan sering dipandang sebagai indikator kesehatan ekosistem hutan tropis secara keseluruhan.

Salah satu kawasan yang memiliki peran peting dalam konservasi orangutan adalah Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Kawasan konservasi ini memiliki luas sekitar 415.040 hektar dan dikenal sebagai salah satu habitat alami orangutan terbesar yang tersisa di dunia (Balai Taman Nasional Tanjung Puting 2025). Selain menjadi habitat penting bagi orangutan, kawasan ini juga memiliki nilai

ekologis strategis sebagai ekosistem rawa gambut tropis yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami serta penopang keanekaragaman hayati. Secara kelembagaan, pengelolaan kawasan ini berada di bawah kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Taman Nasional Tanjung Puting. Kawasan ini juga berkembang sebagai destinasi ekowisata internasional yang menarik perhatian wisatawan dan peneliti dari berbagai negara yang tertarik untuk mengamati orangutan di habitat alaminya.

Meskipun ditetapkan sebagai habitat utama orangutan, Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) terus berhadapan dengan ancaman nyata seperti maraknya kebocoran kawasan akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang, terutama pada siklus *El Niño*, serta tekanan deforestasi dari perkebnunan kelapa sawit di zona penyangga (Gaveau et al. 2016). Kompleksitas tantangan ekologis ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan tidak dapat dilakukan secara efektif oleh pemerintah semata. Keterbatasan sumber daya, luasnya wilayah konservasi, serta dinamika sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan menuntut adanya keterlibatan berbagai aktor dalam proses pengelolaan lingkungan. Dalam kajian hubungan internasional, dinamika tersebut sering dipahami melalui perspektif tata kelola lingkungan *(environmental governance),* yang menekankan pentingnya keterlibatan aktor negara maupun non-negara dalam mengelola isu lingkungan yang kompleks.

Dalam kerangka tersebut, konsep tata kelola kolaboratif *(collaborative governance)* menjadi relevan untuk memahami bagaimana berbagai aktor bekerja sama dalam mencapai tujuan konservasi bersama. Tata kelola kolaboratif merujuk pada proses pengambilan keputusan kolektif yang melibatkan aktor publik dan non-publik dalam suatu forum formal untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bersama. Pendekatan ini memungkinkan integrasi kapasitas negara, organisasi non-pemerintah, serta masyarakat lokal dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi secara lebih efektif.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas konservasi orangutan di TNTP, misalnya fokus pada peran rehabilitasi satwa (Putri 2024), perlindungan habitat (Gaveau et al. 2016), maupun partisipasi masyarakat dalam ekowisata (Pratiwi and Hulu 2025). Namun, studi-studi tersebut cenderung mengisolasi peran satu aktor saja dan belum

memotret bagaimana interaksi kolaboratif antar-aktor dioperasionalkan secara terintegrasi dalam kegiatan konservasi tanpa secara komprehensif menganalisis dinamika interaksi antaraktor dalam kerangka tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, terdapat kekosongan kajian yang secara spesifik mengkaji konservasi orangutan di TNTP melalui perspektif tata kelola kolaboratif yang menekankan interaksi multipihak secara terintegrasi. Pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi tata kelola kolaboratif dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana interaksi dan pembagian peran antara organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan masyarakat lokal membentuk mekanisme tata kelola kolaboratif dalam konservasi orangutan. Artikel ini beragumen bahwa konservasi orangutan di TNTP mencerminkan praktik tata kelola kolaboratif yang relatif efektif melalui kemitraan antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal, meskipun menghadapi berbagai tantangan terkait keberlanjutan pendanaan, dinamika kebijakan, serta kerentanan ekologis kawasan konservasi.

Kekosongan kajian tersebut menunjukkan bahwa konservasi orangutan di TNTP tidak hanya relevan sebagai isu pengelolaan kawasan konservasi, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika environmental governance yang melibatkan interaksi antara aktor negara, NGO internasional, dan masyarakat lokal dalam konteks *local-to-global governance.*

KERANGKA TEORITIS

Tata Kelola Kolaboratif *(Collaborative Governance)*

Perkembangan konsep tata kelola *(governance)* menunjukkan pergeseran dalam cara kebijakan publik dipahami dan dijalankan. Dalam pendekatan klasik, pemerintah *(government)* merujuk pada struktur kekuasaan formal yang bersifat hierarkis dan terpusat, dengan negara menjadi aktor utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan (Noor, Suaedi, and Mardiyanta 2022). Model ini menekankan otoritas tunggal dan mekanisme komando sebagai instrumen pengelolaan urusan publik. Namun, dinamika sosial dan politik kontemporer memperlihatkan bahwa banyak persoalan publik tidak lagi dapat ditangani secara efektif oleh negara secara mandiri.

Konsep tata kelola muncul untuk menjelaskan pola pengambilan keputusan yang lebih luas, yang melibatkan interaksi

antara aktor negara dan non-negara. Dalam kerangka ini, kebijakan publik dihasilkan melalui koordinasi, negosiasi, dan kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan. Kewenangan tidak sepenuhnya berada pada institusi formal negara, melainkan terdistribusi dalam jaringan hubungan yang bersifat interdependen. Dalam perspektif Hubungan Internasional, pendekatan ini juga sejalan dengan berkembangnya konsep tata kelola global yang menekankan keterlibatan aktor lintas negara dalam pengelolaan isu global. Dengan demikian, *governance* menekankan pentingnya kolaborasi dan pembagian tanggung jawab dalam mencapai tujuan publik.

Relevansi pendekatan tata kelola semakin jelas dalam isu lingkungan. Permasalahan seperti deforestasi, kebakaran hutan, dan hilangnya keanekaragaman hayati memiliki karakter kompleks dan melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, serta ekologis. Isu-isu tersebut juga memiliki dimensi transnasional karena dampaknya tidak terbatas pada satu wilayah negara, melainkan berkontribusi terhadap perubahan lingkungan global. Negara sering menghadapi keterbatasan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut, baik dari segi sumber daya, pendanaan, maupun pengetahuan teknis. Oleh karena itu, tata kelola lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai aktor, termasuk organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, dan sektor swasta untuk mendukung efektivitas kebijakan konservasi.

Dalam konteks tersebut, tata kelola kolaboratif berkembang sebagai salah satu pendekatan dalam studi tata kelola publik. (Ansell and Gash 2008) mendefinisikannya sebagai pengaturan yang melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang difasilitasi oleh lembaga publik dan berorientasi pada konsensus. Pendekatan ini menempatkan kolaborasi sebagai mekanisme institusional yang terstruktur, bukan sekedar kerja sama informal. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana aktor negara dan non-negara berinteraksi dalam implementasi kebijakan serta bagaimana proses tersebut dilembagakan dalam struktur koordinasi yang jelas.

Teori tata kelola *(collaborative governance)* (Ansell and Gash 2008) menekankan tiga elemen utama, yaitu partisipasi aktor non-negara dalam proses kebijakan publik, dialog dan pembangunan kepercayaan (*trust-building*) melalui

interaksi yang keberlanjutan, serta komitmen terhadap tujuan bersama yang diformalkan dalam mekanisme koordinasi. Ketiga elemen ini menunjukkan bahwa kolaborasi tidak hanya bertumpu pada keterlibatan sebagai pihak, tetapi juga pada proses komunikasi yang konsisten dan pembentukan rasa saling percaya yang memungkinkan tercapainya kesepakatan kolektif.

Lebih lanjut, (Emerson, Nabatchi, and Balogh 2012) menambahkan bahwa keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh kapasitas bersama *(joint capacity),* legitimasi institusional, dan mekanisme koordinasi yang jelas. Dalam konservasi lingkungan, tata kelola kolaboratif memungkinkan pembagian peran antara negara sebagai pemegang otoritas formal, NGO sebagai penyedia kapasitas teknis dan advokasi, serta masyarakat lokal sebagai aktor yang berinteraksi langsung dengan ekosistem, sehingga menciptakan struktur kerja sama yang saling melengkapi. Dalam konteks Hubungan Internasional, pembagian peran ini juga mencerminkan interaksi antara aktor negara dan non-negara dalam pengelolaan isu global berbasis lokal.

Selain ketiga elemen utama tersebut, (Ansell and Gash 2008) juga mengidentifikasi pentingnya kondisi awal (*starting condition*) dan desain institusional (*intitutional design*) dalam membentuk dinamika kolaborasi. Distribusi sumber daya, pengalaman kerja sama sebelumnya, serta aturan partisipasi yang jelas dapat memengaruhi efektivitas proses kolaboratif. Kepemimpinan fasilitatif juga berperan dalam menjembatani perbedaan kepentingan dan menjaga keberlanjutan dialog antar-aktor. Proses kolaboratif yang berkelanjutan, ditopang oleh komunikasi dan koordinasi yang konsisten, menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan bersama.

Meskipun tata kelola kolaboratif menawarkan kerangka untuk memahami kerja sama multipihak, implementasinya tetap dipengaruhi oleh konteks sosial dan institusional masing-masing wilayah. Distribusi kapasitas antar-aktor, keberlanjutan pendanaan, serta tingkat partisipasi masyarakat dapat memengaruhi hasil kolaborasi. Selain itu, dalam perspektif Hubungan Internasional, efektivitas tata kelola kolaboratif juga dipengaruhi oleh keterkaitan antara dinamika lokal dan dukungan global, termasuk jaringan NGO internasional dan perhatian terhadap isu lingkungan global. Oleh karena itu, pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana partisipasi aktor non-negara, pembangunan kepercayaan, dan mekanisme

koordinasi terbentuk dalam praktik konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting.

Kerangka *collaborative governance* dari (Ansell and Gash 2008) digunakan sebagai pisau analisis utama untuk memahami proses pembentukan dan implementasi kerja sama antaraktor dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Pemilihan kerangka Ansell dan Gash didasarkan pada kemampuannya dalam menjelaskan bagaimana kondisi awal, desain kelembagaan, serta kapasitas bersama memengaruhi keberhasilan kolaborasi antara aktor negara dan non-negara. Sementara itu, konsep joint capacity dari (Emerson et al. 2012) digunakan sebagai konsep pendukung untuk memperjelas bagaimana sumber daya, keahlian, dan kapasitas dari berbagai aktor dapat terintegrasi dalam praktik konservasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan kedua teori tersebut sebagai dua kerangka analisis yang berdiri sendiri, melainkan menempatkan Ansell dan Gash sebagai kerangka utama dengan Emerson et al. sebagai pengayaan konseptual terhadap aspek kapasitas kolaboratif.

Dalam konteks penelitian ini, kerangka *collaborative governance* dari (Ansell and Gash 2008) dioperasionalkan melalui tiga indikator utama yang disesuaikan dengan ketersediaan data sekunder, yaitu: (1) *starting conditions,* yang memotret ancaman karhutla, tekanan deforestasi, dan keterbatasan kapasitas negara sebagai pendorong kolaborasi; (2) *institutional design*, yang mencakup aturan formal, zonasi kawasan, dan legitimasi kelembagaan Balai TNTP dalam melibatkan mitra konservasi; serta (3) *joint capacity,* yang menunjukkan integrasi antara otoritas hukum pemerintah, pendanaan dan kepakaran teknis Orangutan Foundation International (OFI), serta partisipasi masyarakat lokal dalam operasional konservasi. Dengan pembatasan indikator tersebut, analisis difokuskan pada aspek-aspek yang dapat diverifikasi melalui dokumen resmi dan publikasi ilmiah, sehingga lebih konsisten dengan pendekatan penelitian berbasis data sekunder.

Gambar 1. Diagram Collaborative Governance

Sumber: dirancang oleh penulis

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis implementasi tata kelola kolaboratif dalam konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika interaksi antar-aktor dalam konteks tata kelola lingkungan yang kompleks, khususnya dalam melihat relasi antara aktor negara dan non-negara dalam kerangka tata kelola lingkungan *(environmental governance)*. Sumber data penelitian berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi, termasuk laporan tahunan dan publikasi resmi OFI, dokumen kebijakan, dan laporan pemerintah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), data resmi terkait kebakaran hutan dan lahan, serta publikasi lembaga internasional seperti *International Union for Conservation of Nature* (IUCN). Selain itu, artikel jurnal, berita nasional, dan laporan organisasi lingkungan turut digunakan untuk memperkaya konteks analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis tematik dengan mengacu pada kerangka tata kelola kolaboratif dari (Ansell and Gash 2008) yang dalam penelitian ini dioperasionalkan melalui tiga indikator utama, yaitu *starting conditions, institutional design,* dan *joint capacity*. Data dianalisis untuk mengidentifikasi kondisi awal yang mendorong kolaborasi, mekanisme kelembagaan yang melegitimasi keterlibatan aktor, serta integrasi kapasitas antara pemerintah, OFI, dan masyarakat lokal dalam kegiatan konservasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan dinamika konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting dalam kerangka tata kelola kolaboratif, dengan menyoroti signifikansi ekologis kawasan, tekanan utama seperti kebakaran hutan, serta keterkaitannya dengan agenda konservasi global. Temuan ini menjadi penting tidak hanya dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi nasional, tetapi juga dalam memahami bagaimana praktik tata kelola lingkungan berbasis kolaborasi berkontribusi terhadap agenda konservasi global. Pembahasan difokuskan pada pembagian peran antara organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan masyarakat lokal, sekaligus menelaah bagaimana koordinasi, kepercayaan, dan integrasi kapasitas antar-aktor membentuk pola kolaborasi dalam tata kelola lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik

kolaboratif tidak hanya berkontribusi terhadap efektivitas konservasi di tingkat lokal, tetapi juga merefleksikan bentuk tata kelola multi-tingkat *(multi-level governance)* yang menghubungkan kepentingan nasional dan internasional dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, bagian ini berfungsi sebagai jembatan antara kerangka teoretis dan realitas implementasi di lapangan.

Pentingnya Konservasi Orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP)

TNTP merupakan salah satu kawasan konservasi paling strategis di Indonesia dalam perlindungan orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus*). Kawasan ini memiliki luas sekitar 415.040 hektar dan mencakup ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah, hutan rawa air tawar, serta lahan gambut yang memiliki nilai ekologis tinggi (Balai Taman Nasional Tanjung Puting 2025). Struktur ekologis tersebut menjadikan TNTP sebagai habitat penting bagi berbagai spesies endemik dan satwa liar, serta sebagai salah satu bentang alam gambut tropis yang berfungsi sebagai penyerap karbon alami dalam skala besar. Keberadaan kawasan ini juga berkontribusi terhadap stabilitas hidrologis wilayah pesisir Kalimantan Tengah, sehingga perannya melampaui sekadar fungsi konservasi spesies.

Secara lebih luas, TNTP dikenal sebagai Ibu Kota Orangutan di dunia, dengan estimasi populasi mencapai 30.000 - 40.000 orangutan liar yang tersebar di dalam dan sekitar kawasan konservasi di Kalimantan Tengah (Balai Taman Nasional Tanjung Puting 2025). Besarnya populasi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan orangutan Borneo secara global sangat bergantung pada stabilitas ekosistem di kawasan ini. Dengan kata lain, dinamika pengelolaan TNTP memiliki implikasi langsung terhadap agenda konservasi internasional, karena kawasan ini menjadi salah satu benteng terakhir populasi orangutan liar dalam jumlah besar.

Status terancam kritis atau terancam punah *(Critically Endangered)* yang ditetapkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN Red List of Threatened Species, 2024), menegaskan bahwa orangutan Borneo menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi akibat kehilangan habitat, fragmentasi hutan, serta perburuan ilegal. Penurunan populasi dalam beberapa dekade terakhir memperlihatkan bahwa tekanan terhadap habitat alami orangutan masih berlangsung secara

signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan konsesi perkebunan dan area terbuka lainnya. Oleh karena itu, perlindungan kawasan seperti TNTP menjadi komponen kunci dalam strategi konservasi nasional dan internasional, termasuk dalam kerangka komitmen Indonesia terhadap perlindungan keanekaragaman hayati.

Ancaman ekologis di Taman Nasional Tanjung Puting tidak terlepas dari tingginya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah, terutama pada periode 2015. Fenomena ini dipicu oleh kombinasi faktor alam dan aktivitas manusia, seperti pengeringan lahan gambut, pembukaan lahan, serta kondisi iklim kering yang diperparah oleh El Niño. Data Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa provinsi Kalimantan Tengah termasuk wilayah dengan intensitas kebakaran yang tinggi (Kementerian Kehutanan Republik Indonesi 2025). Tingginya frekuensi kebakaran ini menunjukkan kerentanan ekosistem gambut di kawasan tersebut, termasuk wilayah Tanjung Puting, terhadap tekanan lingkungan yang berulang.

Seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah, luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan lonjakan tajam pada tahun-tahun tertentu, terutama pada periode 2015 dan beberapa tahun setelahnya. Pola ini mengindikasikan bahwa kebakaran hutan bukan merupakan peristiwa insidental, melainkan fenomena berulang yang dipengaruhi oleh dinamika iklim dan aktivitas manusia. Visualisasi data tersebut memperkuat argumen bahwa kawasan konservasi seperti TNTP berada dalam tekanan ekologis yang tinggi dan memerlukan strategi pengelolaan yang adaptif serta kolaboratif untuk mengurangi risiko kebakaran di masa depan.

Gambar 2. Diagram Luas Kebakaran Hutan Tahun 2015

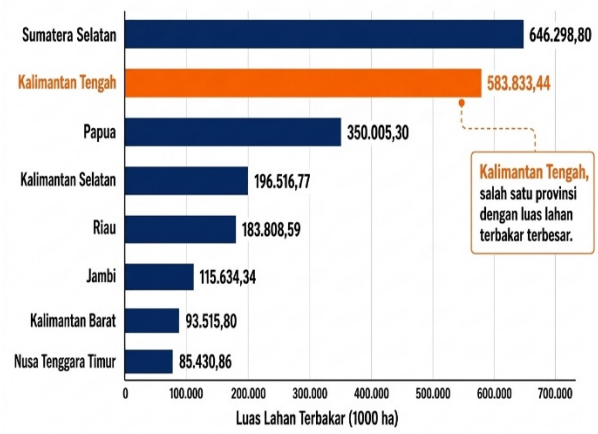

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sistem Informasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SiPongi), 2025 (diolah oleh penulis)

Kebakaran di ekosistem gambut tidak hanya menghancurkan vegetasi permukaan, tetapi juga merusak lapisan tanah gambut

yang menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Dampaknya mencakup penurunan kualitas habitat, berkurangnya ketersediaan pakan, tergantungnya pola reproduksi satwa, serta peningkatan risiko konflik antara manusia dan orangutan (Erb et al. 2018). Dalam jangka panjang, degradasi habitat akibat kebakaran dapat menurunkan daya dukung ekologis kawasan secara keseluruhan. Kondisi ini secara langsung memengaruhi keberlangsungan populasi orangutan yang sangat bergantung pada kestabilan hutan sebagai habitat utama, sehingga memperkuat urgensi upaya konservasi yang tidak hanya berfokus pada perlindungan spesies, tetapi juga pada pemulihan ekosistem secara menyeluruh.

Selain fungsi ekologisnya, TNTP juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang signifikan melalui sektor ekowisata. Kawasan ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, terutama untuk aktivitas pengamatan orangutan di habitat alaminya, termasuk di Camp Leakey. Data kunjungan menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 18.000 wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Taman Nasional Tanjung Puting, dengan pengunjung terbanyak berasal dari Spanyol, Jerman, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis (Arieza 2023). Tingginya jumlah kunjungan wisatawan asing menunjukkan bahwa TNTP memiliki potensi penting dalam jaringan pariwisata alam global sekaligus meningkatkan citra internasional terhadap isu konservasi orangutan. Arus wisata ini sekaligus menciptakan dinamika baru dalam tata kelola kawasan, karena keberlanjutan konservasi juga berkaitan dengan pengelolaan aktivitas pariwisata secara berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, konservasi di TNTP bukan sekadar isu perlindungan satwa karismatik, tetapi merupakan bagian dari agenda perlindungan ekosistem secara menyeluruh serta kontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dan diplomasi lingkungan berbasis kawasan. Kombinasi antara statusnya sebagai konservasi orangutan terbesar di dunia, tingkat ancaman ekologis yang tinggi, serta intensitas kunjungan wisata internasional menjdikan TNTP sebagai ruang interaksi antara kepentingan konservasi, ekonomi lokal, dan perhatian global. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan TNTP membutuhkan pendekatan tata kelola yang tidak hanya bebasis otoritas negara, tetapi juga melibatkan aktor non-negara dan jejaring

internasional dalam menjaga keberlanjutan kawasan secara jangka panjang.

Kondisi Awal (Starting Conditions) dan Desain Institusional

Ancaman kebakaran hutan dan lahan, tekanan deforestasi di zona penyangga, serta status orangutan Borneo sebagai spesies Critically Endangered merupakan kondisi awal (starting conditions) yang mendorong perlunya kolaborasi multipihak dalam pengelolaan TNTP. Dalam perspektif Ansell & Gash (2008), kondisi awal tersebut menjadi faktor pendorong terbentuknya kerja sama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat lokal karena tidak ada satu aktor pun yang memiliki kapasitas memadai untuk menangani ancaman ekologis secara mandiri.

Desain Institusional dalam Tata Kelola Konservasi TNTP

Selain kondisi ekologis yang menjadi pendorong awal kolaborasi, keberhasilan tata kelola konservasi di TNTP juga dipengaruhi oleh desain institusional yang mengatur hubungan antaraktor. Dalam perspektif (Ansell and Gash 2008) institutional design merujuk pada aturan formal, prosedur, serta mekanisme kelembagaan yang memungkinkan berbagai aktor berpartisipasi dalam proses kolaborasi. Dalam konteks TNTP, pemerintah melalui Balai Taman Nasional Tanjung Puting memiliki posisi sebagai pemegang otoritas formal yang menetapkan aturan pengelolaan kawasan, sistem zonasi, serta mekanisme keterlibatan mitra konservasi.

Keberadaan desain kelembagaan tersebut menjadi faktor penting karena memungkinkan organisasi non-pemerintah seperti OFI menjalankan aktivitas konservasi tanpa menggantikan fungsi negara. OFI berperan sebagai mitra yang menyediakan kapasitas teknis, pendanaan, serta dukungan operasional, sementara legitimasi pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam kerangka regulasi pemerintah. Dengan demikian, kolaborasi konservasi di TNTP tidak hanya terbentuk berdasarkan kesamaan tujuan ekologis, tetapi juga melalui aturan institusional yang mengatur pembagian peran dan batas kewenangan antaraktor.

Implementasi Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*)

Implementasi tata kelola kolaboratif di TNTP dapat dianalisis melalui pola interaksi multipihak dalam pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, kolaborasi yang efektif tidak hanya ditandai oleh

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, tetapi juga oleh pembagian peran yang terstruktur, mekanisme koordinasi yang jelas, serta komunikasi yang berkelanjutan dalam proses implementasi kebijakan. Dalam konteks TNTP, praktik tata kelola kolaboratif tercermin dalam sinergi antara pemerintah sebagai pemegang otoritas formal, organisasi non-pemerintah sebagai mitra teknis dan operasional, serta masyarakat lokal sebagai aktor yang berinteraksi langsung dengan ekonomi kawasan.

Manifestasi kapasitas bersama *(joint capacity)* dalam konservasi TNTP tidak berjalan secara tunggal, melainkan melalui mekanisme saling melengkapi antar-aktor. Balai TNTP menyediakan legitimasi hukum, kewenangan pengelolaan kawasan, dan pengaturan zonasi konservasi. OFI berkontribusi melalui pendanaan, teknologi pemantauan, rehabilitasi orangutan, dan kepakaran teknis-medis, sementara masyarakat lokal mendukung patroli karhutla, pengawasan kawasan, dan kegiatan restorasi berbasis komunitas. Integrasi sumber daya tersebut menunjukkan adanya ketergantungan antar-aktor (resource interdependence) yang menjadi fondasi operasional tata kelola kolaboratif.

Untuk memahami dinamika tersebut secara lebih sistematis, bagian ini akan menguraikan implementasi kolaborasi berdasarkan tiga aktor utama yang terlibat, yaitu peran NGO (OFI), peran pemerintah, dan peran masyarakat lokal dalam mendukung keberlanjutan konservasi orangutan di TNTP.

Peran NGO: Orangutan Foundation International (OFI)

OFI merupakan salah satu organisasi non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam konservasi orangutan dan perlindungan ekosistem di TNTP. Organisasi ini telah beroperasi di Kalimantan Tengah selama lebih dari lima dekade dan berkontribusi dalam penelitian ilmiah, perlindungan habitat, rehabilitasi swasta, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Dalam studi konservasi, keterlibatan organisasi non-pemerintah sering dipandang sebagai faktor penting dalam memperkuat kapasitas pengelolaan kawasan lindung, khususnya dalam aspek pendanaan, penelitian, dan mobilisasi dukungan internasional terhadap perlindungan keanekaragaman hayati (Meijaard et al. 2011).

Salah satu kontribusi utama OFI di TNTP adalah penyelenggaraan jangka

panjang mengenai perilaku dan ekologi orangutan di Camp Leakey, yang didirikan oleh DR. Biruté Mary Galdikas pada tahun 1971. Penelitian ini merupakan salah satu studi lapangan orangutan terlama di dunia dan memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman ilmiah mengenai dinamika populasi orangutan Borneo. Pada tahun 2023, kegiatan penelitian mencakup survei kepadatan orangutan menggunakan metode *Marked Nest Plot* untuk mengestimasi populasi melalui perhitungan sarang secara berkala serta pemanfaatan teknologi *drone* dengan sensor inframerah untuk mendeteksi keberadaan orangutan dan memantau kebakaran hutan di kawasan taman nasional (Orangutan Foundation International 2023). Penelitian jangka panjang ini juga menunjukkan adanya penurunan jumlah orangutan jantan dewasa di area Camp Leakey dalam kurun beberapa dekade terakhir, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kehilangan habitat dan fragmentasi hutan (Orangutan Foundation International 2023).

Selama kegiatan penelitian, OFI juga menjalankan berbagai program perlindungan habitat dan restorasi ekosistem di sekitar TNTP. Salah satu strategi yang dilakukan adalah pembentukan zona penyangga (*buffer zone*) melalui akuisisi lahan hutan yang bertujuan untuk melindungi kawasan inti taman nasional dari tekanan eksternal seperti ekspansi perkebunan dan aktivitas pertanian. Berdasarkan OFI *Annual Report* (2023), organisasi ini berhasil mengakuisisi sekitar 155 hektar lahan hutan tambahan di sepanjang Sungai Sekonyer sebagai bagian dari upaya memperluar koridor habitat satwa liar. Selain itu, tim patroli hutan OFI secara rutin bekerja sama dengan aparat kehutanan dan kepolisian untuk mendeteksi pembalakan liar, perburuan satwa, serta melakukan pemadaman kebakaran hutan di sekitar kawasan konservasi (Orangutan Foundation International 2023).

Dalam aspek rehabilitasi satwa, OFI juga mengoperasikan *Orangutan Care Center and Quarantine* (OCCQ) yang berfungsi sebagai pusat penyelamatan dan rehabilitasi orangutan yang kehilangan habitat, yatim piatu, atau menjadi korban perdagangan ilegal. Di fasilitas ini, orangutan mendapatkan perawatan medis serta pelatihan keterampilan bertahan hidup sebelum dilepasliarkan kembali ke habitat alaminya. Berdasarkan data yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya mengenai peran OFI di TNTP, hingga tahun 2021 pusat rehabilitas ini telah merawat sekitar 282 individu orangutan sebelum melalui proses seleksi untuk pelepasliaran kembali ke alam

liar (Putri 2024). Selain itu, program reforestasi yang dijalankan pasca kebakaran hutan tahun 2015 dilaporkan telah menanam lebih dari 400.000 bibit pohon untuk memulihkan habitat satwa liar di kawasan sekitar taman nasional (Putri 2024).

Meskipun demikian, efektivitas program konservasi juga menghadapi sejumlah tantangan ekologis yang signifikan. Laporan terbaru menunjukkan bahwa kebakaran hutan yang dipicu oleh fenomena El Nino pada tahun 2023 menyebabkan kerusakan sekitar 150.000 bibit pohon yang baru ditanam, sehingga tingkat kelangsungan hidup tanaman pada tahun tersebut relatif rendah (Orangutan Foundation International 2023). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program konservasi tidak hanya bergantung pada intervensi organisasi non-pemerintah, tetapi juga pada kondisi ekologis yang lebih luas serta tekanan eksternal terhadap kawasan hutan di Kalimantan.

Selain kegiatan konservasi langsung, OFI juga menjalankan berbagai program pendidikan lingkungan dan kampanye konservasi yang menyasar masyarakat lokal dan sekolah-sekolah di sekitar TNTP. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan orangutan dan dampak aktivitas manusia terhadap kelangsungan hidup satwa liar. Program pendidikan konservasi yang dijalankan OFI pada tahun 2019 berhasil menjangkau lebih dari 23.572 peserta di 136 sekolah, yang menunjukkan kontribusi organisasi ini dalam membangun dukungan sosial terhadap upaya konservasi di tingkat lokal (Putri 2024). Keterlibatan OFI dalam berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa NGO tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program teknis, tetapi juga sebagai aktor yang memperluas kapasitas negara dalam tata kelola konservasi, khususnya dalam aspek pendanaan, pengetahuan ilmiah, dan jaringan internasional.

Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, keterlibatan OFI menunjukkan bagaimana organisasi non-pemerintah dapat berperan sebagai aktor pendukung dalam implementasi kebijakan konservasi yang dipimpin oleh pemerintah. OFI menyediakan kapasitas teknis, sumber daya finansial, serta jangkauan internasional yang memperkuat kemampuan pengelolaan kawasan konservasi oleh negara. Kolaborasi antara OFI, pemerintah, dan masyarakat lokal mencerminkan pembagian peran yang relatif jelas dalam kegiatan penelitian, perlindungan habitat, rehabilitasi satwa, serta edukasi

lingkungan. Model kolaborasi semacam ini sering dipandang sebagai pendekatan yang efektif dalam pengelolaan kawasan konservasi karena memungkinkan integrasi antara kapasitas negara, dukungan organisasi internasional, serta partisipasi masyarakat lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem (Meijaard et al. 2011).

Peran Pemerintah: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Balai Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP)

KLHK bersama Balai TNTP memiliki otoritas formal dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah menyediakan kerangka regulasi, legitimasi kebijakan, serta mekanisme koordinasi antarinstansi yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan kawasan. Dalam sistem pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, taman nasional berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui KLHK yang bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, pengawasan implementasi, serta penegakan hukum terhadap aktivitas yang berpotensi merusak ekosistem (Permen LHK No. 17/2022). Melalui kewenangan tersebut, pemerintah tidak hanya menetapkan arah kebijakan konservasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas pengelolaan kawasan tetap berada dalam kerangka hukum nasional yang berlaku. Keberadaan negara sebagai pemegang otoritas formal menjadi elemen penting dalam menjaga konsistensi kebijakan konservasi di tengah meningkatnya tekanan terhadap ekosistem hutan tropis di Indonesia.

Dalam perspektif *institutional design* (Ansell and Gash 2008), kerangka regulasi dan sistem zonasi yang ditetapkan oleh KLHK berfungsi sebagai aturan main formal (clear ground rules) yang memberikan legitimasi bagi keterlibatan aktor non-negara dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi. Secara institusional, Balai TNTP berfungsi sebagai unit pengelola kawasan yang menjalankan mandat pemerintah dalam operasional konservasi di tingkat lapangan. Tugas ini meliputi pengelolaan zonasi taman nasional, pengawasan terhadap aktivitas manusia di dalam kawasan, pengendalian kebakaran hutan, serta perlindungan terhadap spesies kunci seperti orangutan Borneo (*Pongo pygmaeus).*

Kawasan TNTP sendiri memiliki luas sekitar 415.040 hektar yang terdiri dari ekosistem hutan rawa gambut, hutan dataran rendah, serta kawasan pesisir yang memiliki nilai ekologis tinggi (Balai Taman Nasional Tanjung Puting 2025). Kawasan ini juga memiliki peran penting dalam mendukung sektor pariwisata daerah, terutama melalui

aktivitas ekowisata yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat 2024). Melalui sistem zonasi yang diterapkan pada taman nasional, pemerintah berupaya mengatur pemanfaatan ruang kawasan konservasi agar tetap seimbang antara fungsi perlindungan ekosistem, penelitian ilmiah, dan kegiatan wisata alam yang berkelanjutan (Gaveau et al. 2016). Pengaturan zonasi ini juga berfungsi sebagai instrumen manajemen ruang yang memungkinkan pemerintah mengendalikan interaksi manusia dengan habitat satwa liar sehingga stabilitas ekosistem dapat tetap terjaga.

Selain menjalankan fungsi regulatif, pemerintah juga berperan dalam menyediakan legitimasi kebijakan yang memungkinkan berbagai aktor lain untuk terlibat dalam kegiatan konservasi. Dalam konteks tata kelola kolaboratif, legitimasi institusional dari negara menjadi elemen penting karena memberikan dasar hukum bagi keterlibatan organisasi non-pemerintah, lembaga penelitian, serta masyarakat lokal dalam program konservasi. Tanpa dukungan regulasi yang jelas, inisiatif kolaboratif seringkali menghadapi keterbatasan dalam implementasi dan koordinasi antaraktor (Ansell and Gash 2008; Emerson et al. 2012). Dengan adanya legitimasi dari pemerintah, berbagai program konservasi dapat dijalankan secara lebih terstruktur dan memiliki dasar kelembagaan yang kuat. Hal ini juga memperkuat kepercayaan antaraktor yang terlibat dalam kolaborasi konservasi, yang merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola kolaboratif.

Di tingkat implementasi, Balai TNTP juga berperan sebagai koordinator berbagai program konservasi yang melibatkan organisasi non-pemerintah dan masyarakat sekitar kawasan. Koordinasi ini mencakup kegiatan patroli perlindungan hutan, pemantauan populasi satwa liar, pengendalian kebakaran hutan, serta pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Dalam beberapa program konservasi orangutan, pemerintah bekerja sama dengan organisasi konservasi internasional seperti Orangutan Foundation International serta berbagai lembaga penelitian untuk memperkuat kapasitas teknis dalam perlindungan habitat dan pengelolaan satwa liar (Robertson et al., 2022). Kerja sama ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya bertindak sebagai otoritas pengatur, tetapi juga sebagai aktor yang memfasilitasi sinergi antar pemangku kepentingan. Melalui mekanisme koordinasi

tersebut, berbagai sumber daya dan kapasitas dari aktor yang berbeda dapat diintegrasikan dalam upaya konservasi yang lebih efektif.

Peran pemerintah juga terlihat dalam upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal seperti pembalakan liar, perburuan satwa dilindungi, dan perambahan kawasan hutan. Penegakkan hukum ini dilakukan melalui koordinasi antara Balai TNTP, kepolisian, serta instansi terkait lainnya untuk memastikan bahwa peraturan konservasi dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi di Indonesia, kapasitas negara dalam penegakan hukum merupakan faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan melindungi keanekaragaman hayati (Santika et al. 2017). Penegakan hukum yang konsisten juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap aktivitas ilegal yang dapat merusak habitat satwa liar. Oleh karena itu, kapasitas institusional pemerintah menjadi komponen penting dalam menjaga stabilitas tata kelola kawasan konservasi.

Namun demikian, pemerintah sering kali menghadapi keterbatasan kapasitas dalam pengelolaan kawasan konservasi yang luas dan kompleks. Keterbatasan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia, pendanaan operasional, serta kemampuan pemantauan kawasan yang sangat luas dan sulit dijangkau. Kondisi ini menjadikan kerja sama dengan aktor non-negara sebagai kebutuhan strategis dalam memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Pratiwi & Hulu, 2025). Dalam konteks ini, kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah dan masyarakat lokal tidak hanya menjadi pilihan kebijakan, tetapi juga merupakan strategi praktis untuk mengatasi keterbatasan kapasitas negara dalam menjaga kawasan konservasi yang kompleks.

Dalam perspektif Hubungan internasional, peran pemerintah juga dapat mencerminkan bagaimana negara mempertahankan kedaulatan atas sumber daya alamnya, sekaligus bernegosiasi dengana aktor non-negara dalam kerangka tata kelola global lingkungan. Peran pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan terbentuknya kolaborasi multipihak dalam pengelolaan kawasan konservasi. Pemerintah juga menyediakan kerangka kebijakan, mekanisme koordinasi, serta legitimasi institusional yang memungkinkan aktor lain berpartisipasi dalam upaya konservasi. Dengan demikian, keberadaan negara tetap menjadi fondasi utama dalam struktur tata kelola konservasi, meskipun implementasinya melibatkan

berbagai aktor di luar pemerintah. Struktur kolaboratif ini menunjukkan bahwa keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada kapasitas negara, tetapi juga pada kemampuan pemerintah dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan dan sumber daya yang dimiliki oleh aktor lain.

Peran Masyarakat Lokal

Keterlibatan masyarakat lokal dalam konservasi di TNTP juga berkontribusi pada pembentukan mekanisme kontrol sosial yang melengkapi peran institusi formal negara. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan memiliki pengetahuan lokal (*local knowledge*) mengenai kondisi ekosistem, pola pergerakan satwa, serta dinamika lingkungan yang tidak selalu terdokumentasi secara formal. Pengetahuan ini menjadi sumber informasi penting dalam mendukung kegiatan pemantauan dan perlindungan kawasan, khususnya dalam mendeteksi potensi ancaman seperti kebakaran hutan dan aktivitas ilegal. Integrasi pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam telah terbukti meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi karena mampu memberikan perspektif kontekstual yang tidak dimiliki oleh pendekatan teknokratis (Siombo 2021).

Keterlibatan masyarakat dalam koservasi TNTP juga berkaitan erat dengan pembentukan modal sosial *(social capital*) sebagai fondasi dalam kerja sama kolaboratif. Interaksi yang berkelanjutan antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah mendorong terbentuknya kepercayaan, norma bersama, serta jaringan sosial yang memperkuat koordinasi antaraktor. Dalam praktiknya, kegiatan patroli bersama, program edukasi lingkungan, serta keterlibatan dalam aktivitas ekowisata menjadi ruang interaksi yang mempertemukan berbagai aktor dalam tujuan kolektif yang sama. Tingkat kepercayaan yang tinggi antaraktor terbukti berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya berbasis komunitas (Emerson et al. 2012).

Efektivitas partisipasi masyarakat, bagaimanapun, tidak bersifat otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh desain institusional dan mekanisme insentif yang diterapkan dalam kebijakan konservasi. Partisipasi yang tidak disertai dengan distribusi manfaat yang jelas berpotensi menjadi simbolik *(tokenistic*) dan tidak berkelanjutan. Dalam beberapa konteks, masyarakat hanya dilibatkan pada tahap implementasi tanpa memiliki ruang dalam

proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga mengurangi rasa kepemilikan terhadap program konservasi (Ma and Wen 2019). Oleh karena itu, penting bagi aktor negara dan non-negara untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat bersifat inklusif, deliberatif, dan memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan lokal.

Dalam konteks TNTP, upaya penguatan partisipasi masyarakat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kapasitas yang terintegrasi dalam program konservasi. Program yang dijalankan oleh pemerintah dan mitra seperti Orangutan Foundation International tidak hanya berfokus pada perlindungan lingkungan, tetapi juga pada pengembangan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat kawasan. Berdasarkan OFI Annual Report 2023, keterlibatan masyarakat lokal diwujudkan secara konkret melalui partisipasi dalam patroli hutan bersama, kegiatan pemadaman kebakaran lahan gambut, serta program edukasi lingkungan yang menjangkau komunitas dan sekolah-sekolah sekitar kawasan (Orangutan Foundation International 2023).

Secara lebih spesifik, program pendidikan konservasi yang dijalankan sebelumnyaa tercatat telah menjangkau sekitar 23.572 peserta di 136 sekolah, yang menunjukkan adanya upaya sistematis dalam meningkatkan kapasitas dan kesadaran masyarakat terhadap isu perlindungan orangutan dan ekosistemnya (Putri 2024). Keterlibatan ini tidak hanya memperkuat fungsi perlindungan kawasan, tetapi juga membangun basis sosial yang mendukung keberlanjutan konservasi dalam jangka panjang. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam kegiatan operasional seperti patroli dan pemadaman kebakaran turut meningkatkan rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap kawasan konservasi, yang menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan praktik perlindungan lingkungan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa integrasi antara pendekatan ekologis dan sosial dalam program-program tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi menjadi komponen kunci dalam efektivitas tata kelola konservasi berbasis kolaborasi jangka panjang (Omar et al. 2025)

Meski demikian, dinamika sosial di tingkat lokal tetap menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan kolaborasi. Perbedaan kepentingan antar kelompok masyarakat, ketimpangan akses terhadap sumber daya, serta pengaruh aktor eksternal dapat menciptakan tantangan dalam proses

kolaboratif. Dalam beberapa kasus, kelompok tertentu memiliki posisi yang lebih dominan dalam proses pengambilan keputusan, sementara kelompok lain kurang terakomodasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam distribusi manfaat kosnervasi (Pratiwi & Heriyanti, 2023) . Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya membutuhkan partisipasi, tetapi juga harus memperhatikan aspek keadilan dan representasi dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan demikian, peran masyarakat lokal dalam konservasi TNTP mencerminkan dimensi penting dalam tata kelola kolaboratif, yaitu sebagai aktor yang menjembatani antara kebijakan formal dan realitas implementasi di lapangan. Keterlibatan masyarakat lokal dalam konteks ini juga mencerminkan pergeseran dalam praktik tata kelola lingkungan global yang semakin menekankan pendekatan partisipatif dan iklusif sebagai bagian dari prinsip *sustainable development.* Keterlibatan masyarakat tidak hanya berkontribusi pada efektivitas perlindungan kawasan, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan konservasi. Dalam jangka panjang, keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat bergantung pada kemampuan aktor-aktor yang terlibat untuk membangun kepercayaan, memastikan distribusi manfaat yang adil, serta mengintegrasikan pengetahuan lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan (Ansell and Gash 2008; Emerson et al. 2012).

Interaksi antara OFI, pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan TNTP menunjukkan bahwa implementasi tata kelola kolaboratif tidak hanya ditandai oleh pembagian peran yang terpisah, tetapi juga oleh hubungan interdependensi yang saling melengkapi antaraktor. Pemerintah menyediakan legitimasi institusional dan kerangka regulasi yang menjadi dasar operasional konservasi, sementara OFI memperkuat kapasitas teknis, pendanaan, serta jaringan internasional yang mendukung efektivitas program di lapangan. Di sisi lain, masyarakat lokal berperan dalam memastikan keberlanjutan implementasi melalui partisipasi langsung, pemanfaatan pengetahuan lokal, serta pembentukan kontrol sosial terhadap kawasan konservasi. Pola interaksi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan konservasi di TNTP tidak bergantung pada dominasi satu aktor tertentu, melainkan pada kemampuan sistem kolaboratif dalam mengintegrasikan berbagai kepentingan, sumber daya, dan kapasitas

yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dalam perspektif yang lebih luas, konfigurasi ini mencerminkan praktik tata kelola lingkungan yang semakin bergeser dari pendekatan yang berpusat pada negara *(state-centric)* menuju model tata kelola *(governance)* yang bersifat inklusif, adaptif, dan berbasis jejaring, yang juga relevan dalam dinamika konservasi global.

Meskipun kolaborasi antar-aktor menunjukkan pola kerja sama yang relatif efektif, struktur kolaborasi di TNTP masih memperlihatkan adanya asimetri kapasitas. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendanaan dan dukungan teknis OFI menunjukkan bahwa keberlanjutan program konservasi belum sepenuhnya bertumpu pada kapasitas institusional negara. Di sisi lain, masyarakat lokal lebih banyak terlibat sebagai pelaksana operasional lapangan dibandingkan sebagai aktor yang terlibat secara penuh dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis kawasan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tata kelola kolaboratif di TNTP masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang benar-benar setara.

Tantangan Kolaborasi: Asimetri Kapasitas dan Relasi Kekuasaan Antaraktor

Meskipun praktik tata kelola kolaboratif di TNTP menunjukkan adanya integrasi kapasitas antaraktor, proses tersebut tidak sepenuhnya berlangsung dalam hubungan yang setara. Dalam perspektif (Ansell and Gash 2008) keberhasilan kolaborasi dipengaruhi oleh distribusi sumber daya dan kapasitas awal yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dalam konteks TNTP, pemerintah memiliki keunggulan berupa otoritas hukum dan kewenangan pengelolaan kawasan, sedangkan OFI memiliki kapasitas finansial, jaringan internasional, serta keahlian teknis dalam konservasi orangutan. Sementara itu, masyarakat lokal memiliki posisi yang berbeda karena keterlibatan mereka lebih banyak berada pada tingkat implementasi seperti patroli kawasan, pengawasan lingkungan, dan aktivitas berbasis komunitas.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konservasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting merefleksikan praktik tata kelola kolaboratif yang relatif efektif melalui mekanisme pembagian peran yang saling melengkapi antar-aktor. Balai TNTP memberikan legitimasi hukum dan pengaturan zonasi kawasan, OFI

menyediakan dukungan pendanaan, rehabilitasi, dan kepakaran teknis, sedangkan masyarakat lokal berperan dalam pengawasan kawasan dan pencegahan karhutla di tingkat tapak. Efektivitas kolaborasi tersebut ditopang oleh integrasi kapasitas bersama *(joint capacity)* dan ketergantungan sumber daya antar-aktor dalam merespons ancaman ekologis. Meskipun demikian, keberlanjutan kolaborasi masih menghadapi tantangan berupa ketergantungan pada pendanaan eksternal dan kerentanan ekosistem gambut terhadap kebakaran hutan dan perubahan iklim.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan desain institusional dalam tata kelola konservasi TNTP melalui peningkatan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan strategis, bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan konservasi di tingkat lapangan. Pemerintah dan organisasi konservasi perlu membangun mekanisme partisipasi yang lebih inklusif agar pembagian manfaat, tanggung jawab, dan kewenangan antaraktor dapat berlangsung secara lebih seimbang. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan untuk memahami dinamika negosiasi, pembangunan kepercayaan, serta relasi kekuasaan antaraktor yang belum sepenuhnya dapat ditangkap melalui analisis data sekunder.

REFERENSI

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arieza, U. (2023, 11 September). *5 pesona Tanjung Puting Kalimantan, konservasi orangutan terbesar di dunia.* Kompas.com. https://travel.kompas.com/read/2023/09/11/174000027/5-pesona-tanjung-puting-kalimantan-konservasi-orangutan-terbesar-di-dunia

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat. (2024). *Statistik Dinas Pariwisata Kotawaringin Barat 2024*.

Balai Taman Nasional Tanjung Puting. (2025). *Taman Nasional Tanjung Puting*. https://tanjungputingnp.org/

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *22*(1), 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011

Erb, W. M., Barrow, E. J., Hofner, A. N., & Vogel, E. R. (2018). Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans. *Scientific Reports*, *8*(1), 1–8. https://doi.org/10.1038/s41598-018-25847-1

Gaveau, D. L. A., Sheil, D., Salim, M. A., Arjasakusuma, S., Ancrenaz, M., Pacheco, P., & Meijaard, E. (2016). Rapid conversions and avoided deforestation: Examining four decades of industrial plantation expansion in Borneo. *Scientific Reports*, *6*, 1–13. https://doi.org/10.1038/srep32017

Gunawan, H., Yeny, I., Karlina, E., Suharti, S., Mulyanto, B., Ekawati, S., . . . Nurlia, A. (2022). Integrating social forestry and biodiversity conservation in Indonesia. *Forest, 13*(2). https://doi.org/10.3390/f13122152

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. (2025). *Sistem informasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (SiPongi): Indikasi luas kebakaran*. https://sipongi.gakkum.kehutanan.go.id/indikasi-luas-kebakaran

Ma, B., & Wen, Y. (2019). Community participation and preferences regarding conservation and development policies in China's Giant Panda Nature Reserves. *Sustainability*, *11*(18), 4852. https://doi.org/10.3390/su11184852

Meijaard, E., Buchori, D., Hadiprakarsa, Y., Utami-Atmoko, S. S., Nurcahyo, A., Tjiu, A., . . . Mengersen, K. (2011). Quantifying killing of orangutans and human-orangutan conflict in Kalimantan, Indonesia. *PLoS ONE*, *6*(11), e27491. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027491

Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative governance suatu tinjauan teoritis dan praktik* (F. M. Riyandi & Z. Y. Farid, Ed.). Bildung.

Omar, M. S., Dennis, R., Meijaard, E. M., Sueif, S., Zaini, S., Mohamdih, M., . . . Meijaard, E. (2025). Centering communities in biodiversity monitoring and conservation: Preliminary insights from a citizen science initiative in Kalimantan, Indonesia. *Diversity*, *17*(10), 679. https://doi.org/10.3390/d17100679

Orangutan Foundation International. (2023). *OFI annual report*. https://orangutan.org/wp-content/uploads/2025/10/OFI-2023-Annual-Report.pdf

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Fungsi Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan. (2022). Biro Hukum KLHK.

Pratiwi, A. S., & Heriyanti, A. P. (2024). Community participation in environmental conservation based on Dawuhan tradition in Tegalwaton Village Spring, Semarang Regency. *Indonesian Journal of Earth and Human*, *1*(1), 17–26.

Pratiwi, Y., & Hulu, M. (2025). Keterlibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola ekowisata berkelanjutan: Studi kasus TN Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. *Jurnal Pariwisata Terapan*, *8*(2), 2–6. https://doi.org/10.22146/jpt.107395

Putri, A. N. D. (2024). *Peran Orangutan Foundation International (OFI) dalam pengelolaan serta pengaruh pada kawasan Taman Nasional Tanjung Puting di Kotawaringin Barat 2015-2021* [Skripsi tidak diterbitkan]. Universitas Muhammadiyah Malang.

Santika, T., Meijaard, E., Budiharta, S., Law, E. A., Kusworo, A., Hutabarat, J. A., . . . Wilson, K. A. (2017). Community forest management in Indonesia: Avoided deforestation in the context of anthropogenic and climate complexities. *Global Environmental Change*, *46*, 60–71. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.08.002

Siombo, M. R. (2021). Local wisdom as basic material for drafting local government regulations: A case study of Dayak forest fires in Kalimantan, Indonesia. *Linguistics and Culture Review*, *5*(S3), 1067–1075. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS3.1690

Robertson, J. M. Y., Leiman, A. E., Gunawan, H., Tawakkal, I., Purbatrapsila, A., Jakirudin, M., Lazuardi, D. Y. R., Bani, S. N., Pratama, M., & Perdana, Y. (2022). Three decades of the Orangutan Foundation's conservation programmes in Central Kalimantan, Indonesia. *Malayan Nature Journal*, *74*(2), 169–183.